

# BAB I

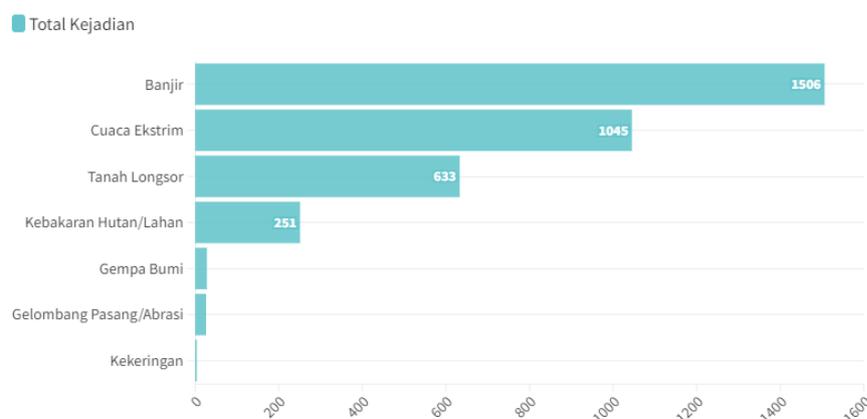
## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kondisi permukaan bumi Indonesia yang berada pada jalur Cincin Api menjadikan negara ini berisiko tinggi akan terjadinya bencana. Setiap bencana yang terjadi pasti berdampak pada lingkungan kehidupan manusia. Bencana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat menjadi ancaman dan gangguan pada kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis yang disebabkan karena adanya faktor alam, faktor non alam ataupun faktor manusia (BNPB, 2021)

Indonesia disebut oleh World Bank sebagai negara yang menduduki peringkat ke-12 dari 35 negara di dunia yang memiliki risiko tinggi terhadap banyaknya korban jiwa, dan kerugian ekonomi akibat berbagai jenis bencana karena keragaman geografis wilayah dan jumlah populasi yang lebih dari 200 juta penduduk tinggal di daerah rawan bencana dengan kualitas bangunan publik maupun non publik yang tidak tahan bencana (Kemenkeu, 2021). Hal-hal yang menjadi penyebab Indonesia rentan bencana diantaranya yaitu karena faktor demografi, hidrometeorologi, geologi, geografi, dan lingkungan sehingga dapat diketahui bahwa yang menjadi penyebab bencana bukan hanya karena peristiwa alam (*natural hazards*), tetapi juga bisa disebabkan karena tingkah atau perilaku manusia (*non-made hazards*). (Isnaini, 2022)

Berikut jumlah kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2022:



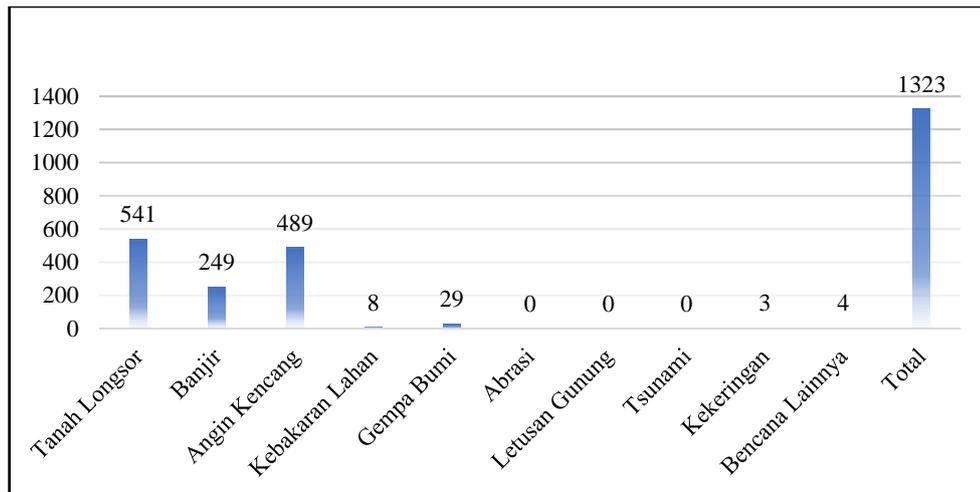
**Gambar 1. 1 Jumlah Kejadian Bencana Alam di Indonesia 2022**

Sumber: Annur, 2023 pada <https://databoks.katadata.co.id/>

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat diketahui bahwa sejak 1 Januari sampai dengan 29 Desember 2022, terdapat 3.494 bencana alam di Indonesia dan diketahui bahwa bencana alam yang paling sering terjadi yaitu banjir yang setara dengan 43,1% dari total kejadian bencana secara nasional sebanyak 1.506 kejadian. Kemudian ada cuaca ekstrem dengan jumlah 1.045 kejadian, tanah longsor dengan jumlah 633 kejadian, kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah 251 kejadian, gempa bumi dengan jumlah 28 kejadian, abrasi dengan jumlah 26 kejadian, dan kekeringan dengan jumlah 4 kejadian.

Total kejadian bencana alam yang banyak tersebut menunjukkan bahwa provinsi yang paling banyak mengalami bencana alam pada tahun 2022 adalah Provinsi Jawa Barat (Annur, 2023). Kepala BNPB, Doni Monardo menuturkan bahwa Jawa Barat dikenal sebagai ‘supermarket’ bencana hampir semua bencana sudah pernah terjadi di wilayah Jawa Barat, mulai dari bencana banjir sampai tsunami pun pernah terjadi (Sudarno, 2019). Pihak BNPB menyebutkan bahwa Jawa Barat menempati urutan pertama, dan bukan untuk pertama kalinya sebagai

provinsi dengan jumlah kejadian bencana terbanyak se-Indonesia sehingga perlu diperhatikan peta sebaran bencana tingkat Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Ni'am, 2022). Berikut data kejadian bencana alam di Jawa Barat pada tahun 2022.



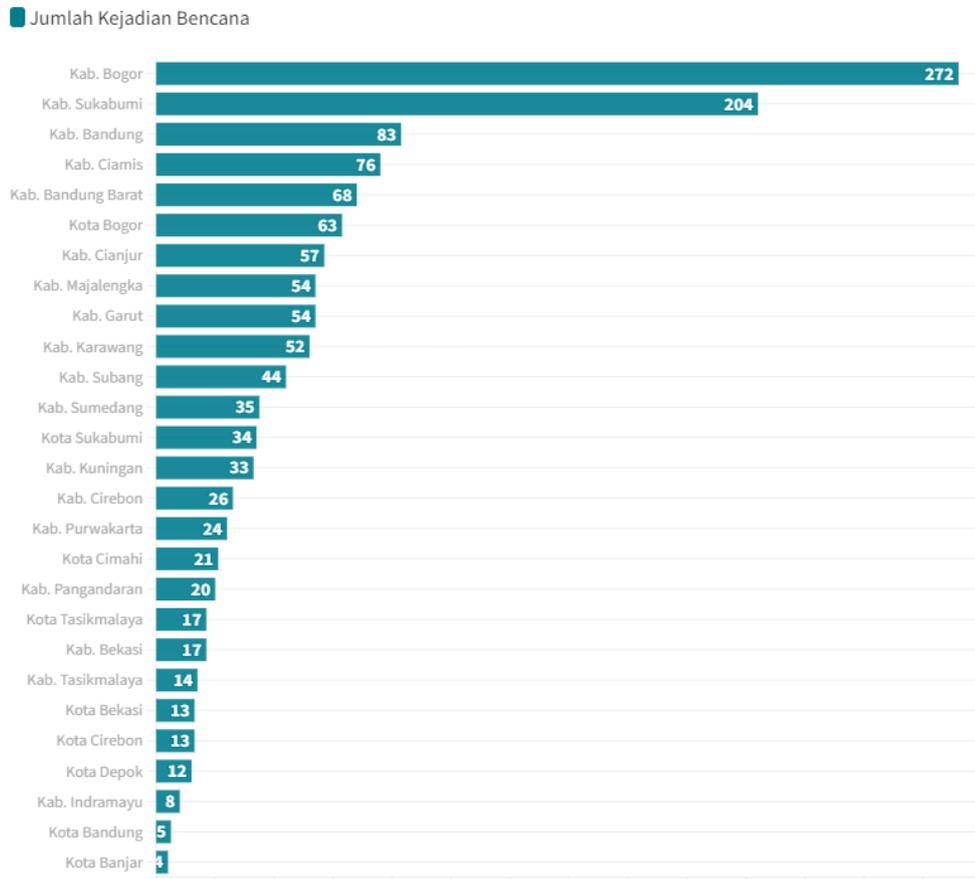
**Gambar 1. 2 Kejadian Bencana Alam di Jawa Barat Tahun 2022**

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Barat, 2023

Berdasarkan Gambar 1.2, dapat terlihat bahwa bencana alam di Jawa Barat masih tinggi. Total bencana yang terjadi sebanyak 1.323 dan yang paling banyak terjadi sepanjang tahun 2022 adalah bencana tanah longsor sebanyak 541 kali, kemudian disusul dengan bencana angin kencang sebanyak 489 kali, banjir sebanyak 249 kali, gempa bumi sebanyak 29 kali, kebakaran lahan 8 kali, dan bencana lainnya.

Jumlah bencana yang terjadi tersebut tentu saja berbeda-beda setiap daerahnya karena memiliki risiko dan tingkat kerentanan terhadap bencana yang berbeda pula. Jika diuraikan jumlah kejadian bencana per daerah, maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

### Jumlah Kejadian Bencana di Wilayah Provinsi Jawa Barat per Kabupaten/Kota Tahun 2022

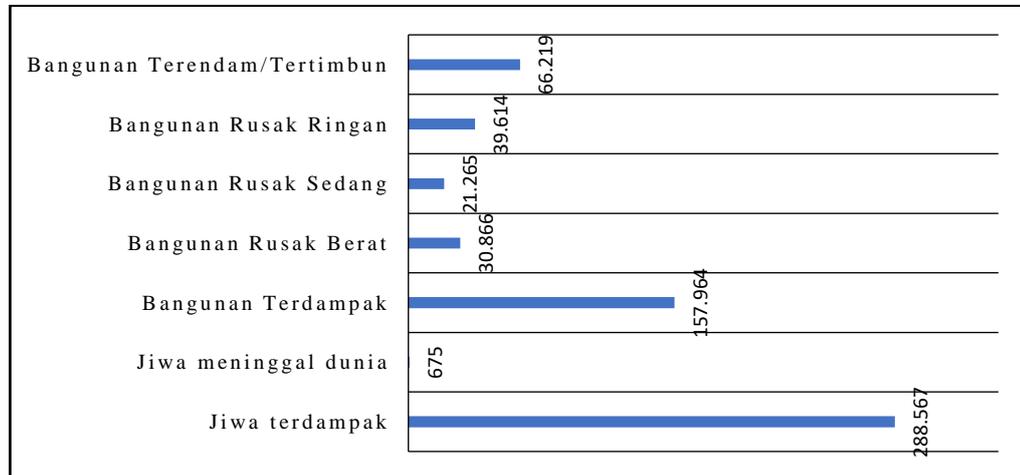


**Gambar 1. 3 Kejadian Bencana di Jawa Barat per Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Barat, 2023

Berdasarkan Gambar 1.3, dapat diketahui secara jelas bahwa dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, terdapat tiga daerah yang paling banyak terjadi bencana alam yaitu Kabupaten Bogor dengan jumlah 272 kejadian, Kabupaten Sukabumi 204 kejadian, dan Kabupaten Bandung sebanyak 86 kejadian. Adapun 3 daerah dengan kejadian bencana paling sedikit yaitu Kota Banjar dengan 4 kejadian, Kota Bandung dengan 5 kali bencana, dan Kabupaten Indramayu dengan 8 kejadian.

Berikut data kerusakan yang diakibatkan adanya bencana di Jawa Barat pada tahun 2022.



**Gambar 1. 4 Kerusakan Akibat Bencana di Jawa Barat**

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Barat, 2023

Berdasarkan Gambar 1.4, dapat terlihat bahwa bencana alam yang terjadi selama tahun 2022 mengakibatkan banyaknya jiwa yang terdampak mencapai 288.567 orang, jiwa yang meninggal dunia sebanyak 675, dan bangunan dengan tiga kriteria yang terdampak sebanyak 157.964 bangunan sehingga pemerintah perlu siap tanggap dalam menanggulangi hal tersebut.

Keterkaitan daerah rawan bencana dengan keuangan daerah yakni perlu adanya perhatian Pemerintah Daerah Jawa Barat yang rawan bencana harus memiliki tingkat kesiapsiagaan yang lebih, terutama dalam kesiapan dana untuk penanggulangan dampak risiko bencana. Pemerintah memiliki tanggungjawab yang lebih dalam pemulihan pasca bencana yang mengakibatkan banyaknya kerusakan.

Setiap bencana alam maupun non-alam yang terjadi perlu dilakukan penanggulangan secara cepat dan tepat untuk memperkecil kemungkinan kerusakan, kerugian dan korban jiwa. Penanggulangan bencana menjadi bagian dari amanat

konstitusi negara Indonesia, yakni UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-IV berkaitan dengan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah sangat diperlukan kehadirannya mulai dari pencegahan sampai dengan penanggulangan pasca bencana karena erat kaitannya dengan keselamatan publik. (Heryati, 2020)

Pentingnya peran pemerintah daerah semakin menonjol, mengingat pemerintah daerah cenderung lebih mengenal ancaman domestik terkait dengan potensi bencana dan tingkat kerentanan. Pemerintah daerah juga berfungsi sebagai saluran aktif bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dari risiko bencana. Terutama, pemerintah daerah di daerah yang rentan terhadap bencana diharapkan selalu siap sedia dan tanggap dalam menyusun anggaran penanggulangan bencana untuk memastikan keberlanjutan keselamatan masyarakat (Heryati, 2020). Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa alokasi dana penanggulangan bencana berasal dari pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk menjamin pelaksanaan proses penanggulangan yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca-bencana.

Di Provinsi Jawa Barat, aturan penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menjelaskan bahwa

penyelenggara penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau biasa disebut dengan Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun rencana penanganan kedaruratan bencana untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh Badan dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan. Penerimaan, pengerahan dan penggunaan sumber daya manusia, logistik berada di bawah kendali Kepala Badan, sekaligus dengan dana yang diterima dari APBN dan APBD, untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada BNPB, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima, sementara yang diterima dari masyarakat berupa uang/barang dipertanggungjawabkan kepada Gubernur.

Postur anggaran Daerah Jawa Barat saat ini mulai menunjukkan fiskal yang kian membaik seiring kasus pandemi yang kian menurun, namun dalam laporan keuangan BPBD Provinsi Jawa Barat tahun 2021, terjadi defisit anggaran.

**Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran BPBD Provinsi Jawa Barat 2020-2022**

Uraian	2020	2021	2022
<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	-	-
Belanja			
Belanja Operasi	23.786.658.229	25.004.106.235	30.009.293.789
Belanja Modal	610.306.758	555.877.000	802.224.100
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>24.396.964.987</b>	<b>25.559.983.235</b>	<b>30.811.517.889</b>
<b>Surplus/Defisit Anggaran</b>	<b>(24.396.964.987)</b>	<b>(25.559.983.235)</b>	<b>(30.811.517.889)</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>(24.396.964.987)</b>	<b>(25.559.983.235)</b>	<b>(30.811.517.889)</b>

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan BPBD Prov. Jabar  
(Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa keuangan di BPBD mengalami kenaikan defisit dari tahun 2020 ke tahun 2022 karena total belanja mengalami peningkatan. Penanggulangan bencana yang baik harus dilakukan dengan pengidentifikasian daerah rawan bencana yang didukung dengan penganggaran, pencairan dan penggunaan dana sebaik mungkin, transparan dan akuntabel. Dengan pengidentifikasian tersebut, maka pemerintah memiliki fokus prioritas daerah yang harus diberikan perhatian khusus dalam hal penganggaran. Namun, hal yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah adanya tantangan dalam hal penganggaran untuk penanggulangan bencana karena keterbatasan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah. Anggaran selalu menjadi perhatian utama dan tantangan dalam penanganan bencana di Indonesia bahkan negara-negara di Dunia mulai dari mitigasi hingga pembangunan pasca-bencana untuk mengurangi risiko dari bencana itu sendiri (Syarifah, Poli, Ali, Rahmat, & Widana, 2020). Kurangnya anggaran untuk penanggulangan bencana seringkali menjadi penghambat pada pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan penanggulangan bencana, sehingga diperlukan strategi khusus penganggaran dalam penanggulangan bencana di Jawa Barat sehingga ketersediaan dana cadangan lebih meningkat dan menjadi prioritas pemerintah.

Berdasar pada permasalahan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mendalami penganggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dalam merespon bencana yang terjadi karena permasalahan secara jelas mencerminkan kebutuhan untuk merumuskan strategi penganggaran yang lebih efektif dan responsif dalam menghadapi bencana. Pemahaman akan dimensi-

dimensi strategi publik menurut Geoff Mulgan, yaitu tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran, menjadi penting dalam konteks ini. Dari segi tujuan, strategi penganggaran harus memprioritaskan daerah rawan bencana untuk memastikan penanganan yang optimal. Lingkungan yang melibatkan faktor-faktor geografis dan sosial juga perlu diperhitungkan agar penganggaran dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan setempat. Pengarahan dalam penggunaan dana menjadi aspek krusial untuk memastikan fokus prioritas sesuai dengan identifikasi daerah rawan. Tantangan dalam kapasitas fiskal daerah, seperti yang diakui penulis, menjadikan tindakan yang efisien dan efektif dalam penganggaran menjadi semakin penting. Pembelajaran dari pengalaman sebelumnya, seperti kurangnya anggaran yang mempengaruhi tahapan kegiatan penanggulangan, perlu dijadikan dasar untuk merumuskan strategi penganggaran yang lebih baik dan terukur.

Dengan menggabungkan teori strategi publik Mulgan (2009) ke dalam penelitian, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul yaitu **“Strategi Penganggaran Dalam Penanggulangan Bencana di Jawa Barat”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Bencana menjadi peristiwa yang dapat menjadi ancaman dan gangguan pada kehidupan masyarakat sehingga dapat mengakibatkan kerugian

2. Jawa Barat sebagai daerah yang paling banyak terjadi bencana di Indonesia perlu menjadi perhatian lebih dalam kesiapsiagaan pemerintah daerah menangani risiko bencana.
3. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah seringkali menjadi permasalahan karena anggaran daerah tidak hanya diperuntukkan pada penanganan bencana daerah.
4. Terjadi peningkatan angka defisit anggaran BPBD Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020 ke tahun 2022

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka diperoleh rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana tujuan penganggaran dalam penanggulangan bencana di Jawa Barat yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana kondisi lingkungan BPBD Provinsi Jawa Barat mempengaruhi strategi penganggaran penanggulangan bencana?
3. Bagaimana pengarahannya dalam penganggaran penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana tindakan-tindakan konkret yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat dalam penganggaran untuk penanggulangan bencana di Jawa Barat?
5. Bagaimana pembelajaran yang menjadi evaluasi penganggaran dalam penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran berikutnya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tujuan penganggaran BPBD Provinsi Jawa Barat dalam penanggulangan bencana di Jawa Barat
2. Untuk mengetahui kondisi lingkungan BPBD Provinsi Jawa Barat dalam mendukung penganggaran penanggulangan bencana di Jawa Barat
3. Untuk mengetahui pengarahannya dalam penganggaran bencana di Jawa Barat yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat
4. Untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan BPBD Provinsi Jawa Barat dalam penganggaran untuk penanggulangan bencana di Jawa Barat
5. Untuk mengetahui pembelajaran yang menjadi evaluasi untuk penganggaran penanggulangan bencana di tahun mendatang

## **E. Manfaat Hasil Penelitian**

### **1. Secara Teoretis**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti mengenai strategi penganggaran penanggulangan bencana daerah Jawa Barat, serta dapat memberikan bahan referensi kepada peneliti lainnya dalam pengkajian strategi pembiayaan bencana daerah.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

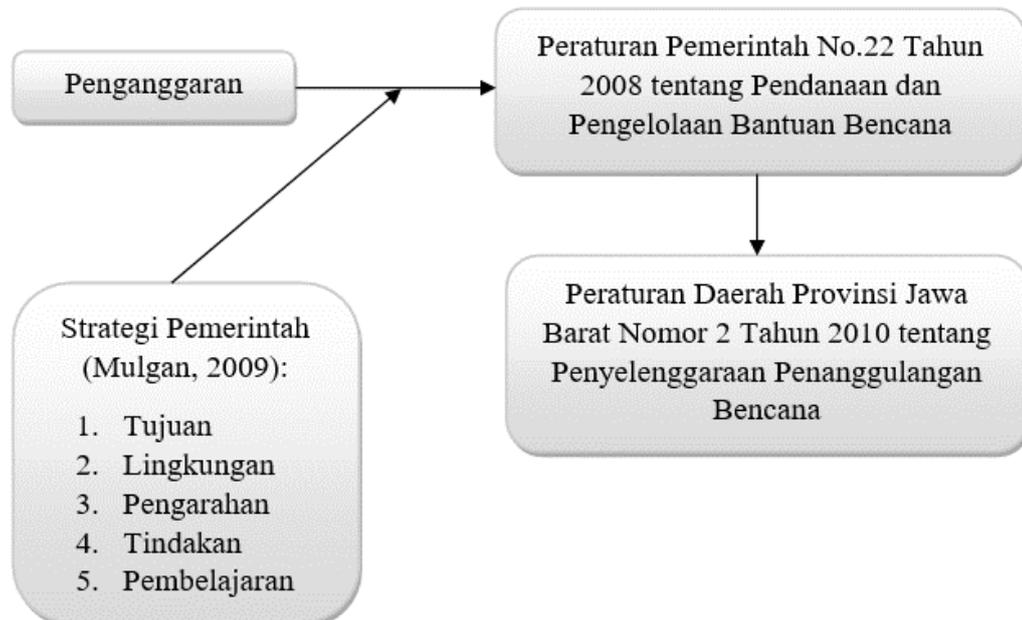
Hasil penelitian ini sebagai wujud penerapan ilmu yang telah diperoleh peneliti selama menjalani perkuliahan di jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

#### **b. Bagi Instansi**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pembuktian mengenai pentingnya proses penganggaran sekaligus menjadi masukan untuk melakukan manajemen strategi berkaitan dengan anggaran penanggulangan bencana di Jawa Barat dalam mendukung misi ketiga RPJMD 2018-2023 yang memiliki sasaran untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bencana dan strategi untuk mengurangi bencana.

## F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada strategi penganggaran berkaitan dengan penanggulangan bencana. Anggaran selalu menjadi perhatian utama dan tantangan dalam penanganan bencana di Indonesia bahkan negara-negara di Dunia mulai dari mitigasi hingga pembangunan pasca-bencana untuk mengurangi risiko dari bencana itu sendiri (Syarifah et al., 2020). Pemerintah daerah bersama lembaga yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak kerusakan yang diakibatkan bencana yang terjadi. Strategi dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan bencana (Unswagati et al. 2016), salah satunya strategi penganggaran dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana sehingga menjadi lebih optimal.



**Gambar 1. 5 Kerangka Pemikiran**  
(Diolah Peneliti, 2023)